

SEJARAH BANK INDONESIA : SISTEM PEMBAYARAN
Periode 1997-1999



Cakupan :

	Halaman
1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran Periode 1997-1999	2
2. Arah Kebijakan 1997-1999	3
3. Langkah-Langkah Strategis 1997-1999	4
4. Sistem Pembayaran Tunai	6
a. Manajemen Alat Pembayaran Tunai 1997-1999	6
b. Alat Pembayaran Tunai 1997-1999	7
5. Sistem Pembayaran Non Tunai	12
a. Manajemen Alat Pembayaran Non Tunai 1997-1999	12
b. Alat Pembayaran Non Tunai 1997-1999	13

1. Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Sistem Pembayaran Periode 1997-1999



Krisis telah menimbulkan kesulitan likuiditas yang luar biasa bagi perbankan dan memporak-porandakan ekonomi nasional. Sementara itu, dalam sektor perbankan terjadi kesulitan besar dalam likuiditas akibat hancurnya pasar uang antar bank (PUAB). Sebagai *lender of last resort*, Bank Indonesia (BI) harus membantu mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan pembayaran untuk mempertahankan kelangsungan

ekonomi nasional. Kondisi perekonomian semacam itu menyebabkan dunia perbankan mengalami kesulitan likuiditas yang amat parah. Ketika persediaan uang kertas sudah mencapai titik kritis, BI dengan terpaksa mengeluarkan *commemorative notes* untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan. Uang kertas pecahan Rp 50.000 dari bahan plastik tersebut seharusnya diedarkan secara terbatas, untuk keperluan tertentu, dan dalam jumlah yang sangat sedikit. Namun demikian, pada periode ini juga sempat dikeluarkan uang logam khusus peringatan Seri *For The Children of The World*. Uang logam dengan bahan emas dan perak tersebut diterbitkan pada bulan Januari 1999 dalam rangka ulang tahun UNICEF ke-50 guna menghimpun dana untuk kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia.

Pada periode ini, di dalam bidang pembayaran non tunai, BI menciptakan sistem BI-LINE atau layanan transaksi dan informasi secara elektronik. Sistem tersebut digunakan untuk mempercepat pelayanan, peningkatan mutu, dan akurasi pelayanan Bank Indonesia. Mulanya digunakan sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) yang sederhana dan disebut SAKTI II sehingga diubah menjadi BI-LINE. Layanan ini digunakan untuk mengatasi kebutuhan mendesak, seperti kegiatan pasar uang yang menggunakan bilyet giro atau transfer dana dari kantor pusat ke cabang di daerah. BI-LINE merupakan solusi "antara" atas kendala-kendala yang dihadapi dengan digunakannya dokumen (*paper based*). Dengan menggunakan sistem tersebut, maka dapat diperoleh beberapa manfaat, yaitu efisiensi dalam *interbank electronic fund transfer system* sehingga bank tidak perlu membuat bilyet giro untuk Bank Indonesia karena transfer dapat dibuat secara langsung; pengelolaan dana lebih baik karena tersedia informasi saldo rekening di kantor pusat BI; meminimalkan *money in transit*; dan mengurangi volume kerja di bagian akunting BI.

Pada tahun 1998, di Jakarta dilaksanakan kliring elektronik yang disebut Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ). Dengan sistem ini, bank-bank memasukkan input semua data debit dan kredit dalam komputer dan mengirimkan secara elektronik kepada bagian kliring BI yang akan diteruskan kepada bagian akunting untuk perhitungan. Sementara warkat kliring yang diserahkan secara langsung hanya digunakan sebagai bahan pembanding

2. Arah Kebijakan 1997-1999

kebijakan sistem pembayaran pada periode ini lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan jasa perbankan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan untuk menekan sekecil mungkin risiko sistem pembayaran, meningkatkan pengamanan dan efisiensi sistem pembayaran nasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sistem pembayaran Indonesia.

Ada dua permasalahan besar yang dihadapi dalam bidang sistem pembayaran nasional dalam periode ini, yaitu:

(i) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional yang berakibat pada penarikan uang tunai secara besar-besaran akibat terjadinya krisis perbankan, dan

(ii) adanya kekhawatiran masyarakat terhadap keandalan sistem pembayaran dalam memasuki tahun 2000 yang dikenal dengan istilah Year 2 Kilo (Y2K) compliance atau Masalah Komputer Tahun 2000 (MKT 2000).

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas, kebijakan sistem pembayaran pada periode ini lebih diarahkan pada peningkatan pelayanan jasa perbankan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan untuk menekan sekecil mungkin risiko sistem pembayaran, meningkatkan pengamanan dan efisiensi sistem pembayaran nasional serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sistem pembayaran Indonesia.

3. Langkah-Langkah Strategis 1997-1999

Ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan pada periode ini, baik yang terkait dengan alat pembayaran tunai maupun dengan alat pembayaran non tunai.

Ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan pada periode ini, baik yang terkait dengan alat pembayaran tunai maupun dengan alat pembayaran non tunai. Langkah-langkah strategis yang terkait dengan alat pembayaran tunai adalah:

1. Dalam rangka mengantisipasi kebutuhan alat pembayaran tunai akibat penarikan besar-besaran oleh masyarakat akibat krisis perbankan pada tahun 1997-1998, dan sebagai antisipasi peningkatan kebutuhan alat pembayaran tunai sehubungan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap sistem pembayaran dengan pergantian tahun 1999 ke tahun 2000, Bank Indonesia selain melakukan kegiatan dalam rangka manajemen pengedaran uang yang rutin juga mengambil beberapa langkah khusus. Langkah-langkah tersebut meliputi penambahan pencetakan uang, pelonggaran kriteria pemusnahan uang, pengedaran uang peringatan khusus (commemorative notes) secara biasa, serta peningkatan pelayanan kas bagi bank-bank dan masyarakat.
2. Terkait dengan kebijakan di masa krisis, Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami saldo negatif pada rekening gironya di Bank Indonesia dalam bentuk pemberian izin bersaldo debit. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kebijakan mengenai penggunaan Nota Debet Dalam Kliring, yang semula dimaksudkan untuk membantu mengurangi risiko kegagalan sistem pembayaran yang ditanggung Bank Indonesia. Namun pada akhirnya penggunaan Nota Debet Dalam Kliring dibatasi, karena ternyata pada saat krisis, bank yang sudah bersaldo debit dan berhutang dalam pasar uang antarbank (PUAB) akan bertambah besar saldo debetnya karena dibebani oleh bank pemberi pinjaman. Hal itu berarti dana Bank Indonesia yang digunakan oleh perbankan akan bertambah besar pula.
3. Untuk mengendalikan peningkatan saldo debit, Bank Indonesia membuat kesepakatan dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yaitu bahwa pengalihan dana yang berada di bawah pengawasan BPPN harus di-countersign. Countersign adalah suatu tindakan darurat yang dilakukan oleh pejabat BPPN dalam rangka mengontrol penggunaan dana Bank Indonesia oleh bank yang mempunyai saldo debit dengan cara mengganti Nota Kredit antarbank dengan bilyet giro Bank Indonesia.
4. Di luar permasalahan krisis, Bank Indonesia melakukan otomasi administrasi perkasan (OAP) dalam rangka meningkatkan upaya penyediaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan uang rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai dan pada waktu yang tepat.
5. Bank Indonesia memperbarui ketentuan tentang persyaratan dan tata cara membawa uang rupiah masuk dan keluar wilayah Republik Indonesia.
6. Dalam rangka meneruskan dan mengembangkan program di bidang pembayaran non tunai, Bank Indonesia mengimplementasikan Sistem Kliring Elektronik; sistem kliring yang memisahkan nilai nominal besar dan ritel; dan sistem transfer

dana antara Bank Indonesia dan bank-bank secara elektronik yang dikenal dengan nama Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi secara Elektronik (BI-LINE). Solusi dalam bentuk BI-LINE dilakukan dengan pertimbangan tingginya inefisiensi dalam pemrosesan warkat, baik di lokasi bank maupun di lokasi Bank Indonesia; kemacetan jalan di Jakarta yang mengakibatkan bank harus menetapkan sela waktu yang cukup panjang antara penyelesaian warkat dan waktu mengantarkan warkat ke Bank Indonesia; dan demonstrasi yang marak di Jakarta dapat menghambat akses ke Bank Indonesia.

7. Pada tahun 1999 diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU BI), yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam Pasal 8 UU BI diatur bahwa salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam rangka penyusunan Rancangan UU BI (RUU BI) tersebut, Tim dari Bank Indonesia turut bekerja menjadi nara sumber, baik dalam pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah (antara lain Departemen Keuangan) maupun dalam proses pembahasan RUU BI yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
8. Pada akhir tahun 1997 Bank Indonesia telah melakukan uji coba Sistem Kliring Elektronik Jakarta. Uji coba tersebut dilakukan karena volume perputaran kliring Jakarta mencapai lebih dari setengah perputaran kliring nasional dengan nilai sekitar 90%.
9. Pada awal tahun pembukuan 1999 satuan kerja akunting Bank Indonesia mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Nasabah (SINAS) yang dimaksudkan dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan proses pemberian informasi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Langkah ini dilakukan karena dirasakan bahwa transaksi keuangan pada Bank Indonesia semakin banyak.
10. Pada periode ini Bank Indonesia juga melanjutkan pengembangan Sistem BI-RTGS (Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement) yang sudah dimulai sejak tahun 1997, dan direncanakan akan diimplementasikan pada tahun 2000. Proses pembayaran dengan sistem BI-RTGS dilakukan secara seketika (real time) dan secara elektronik.

**4. Sistem Pembayaran Tunai :
a. Manajemen Alat Pembayaran Tunai 1997-1999**

Sebagaimana telah disinggung di atas, manajemen Alat Pembayaran Tunai pada periode ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manajemen untuk pemenuhan alat pembayaran tunai pada masa krisis.
2. Manajemen pengedaran uang di luar permasalahan krisis.

Sebagaimana telah disinggung di atas, manajemen Alat Pembayaran Tunai pada periode ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Manajemen untuk pemenuhan alat pembayaran tunai pada masa krisis yang ditujukan pada memperbesar persediaan kas untuk memenuhi kebutuhan uang kartal yang meningkat, melalui:
 - a. Menambah jumlah pesanan cetak terutama untuk pecahan besar.
 - b. Memasukkan uang plastik pecahan Rp50.000,- ke dalam peredaran uang biasa.
 - c. Memperpanjang usia layak edar uang kertas pecahan Rp5.000,- ke atas.
2. Manajemen pengedaran uang di luar permasalahan krisis, dilakukan melalui:
 - a. Pemenuhan kebutuhan pecahan kecil yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, terutama di daerah-daerah, dan juga pemenuhan kebutuhan pecahan besar dalam rangka mengantisipasi transaksi dengan nilai besar.
 - b. Pemberian tanda tidak berharga pada uang logam sebagai upaya untuk menjalankan clean money policy.

Sebagai pendukung kegiatan manajemen pada angka 1, sebagaimana telah disebutkan di atas, Bank Indonesia melakukan otomasi administrasi perkasan (OAP). Petunjuk pelaksanaan OAP diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/7/Intern tanggal 14 Juli 1997 perihal Otomasi Administrasi Perkasan Bank Indonesia. Pelaksanaan OAP dilakukan secara bertahap. Pada tahun 1997 di kantor-kantor Bank Indonesia (KBI) Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Manado. Selanjutnya pada tahun 1998 dilaksanakan di 12 KBI lainnya.

b. Alat Pembayaran Tunai 1997-1999

Dalam rangka mengantisipasi penarikan uang tunai secara besar-besaran oleh masyarakat yang mulai menurun kepercayaannya kepada perbankan, Bank Indonesia menambah jumlah pesanan cetak uang tunai, terutama pecahan besar.

Dalam rangka mengantisipasi penarikan uang tunai secara besar-besaran oleh masyarakat yang mulai menurun kepercayaannya kepada perbankan, Bank Indonesia menambah jumlah pesanan cetak uang tunai, terutama pecahan besar. Bahkan uang plastik pecahan Rp50.000,- yang semula peruntukannya adalah sebagai uang khusus peringatan (*commemorative notes*), akhirnya dimasukkan ke dalam peredaran uang biasa pada Februari 1998.

Dalam periode ini Bank Indonesia menerbitkan uang kertas pecahan Rp20.000,- dan Rp10.000,- yang keduanya bertanda tahun 1998 dan diedarkan masing-masing mulai 23 Januari 1998 dan 18 Februari 1998. Kedua pecahan itu dikeluarkan dalam rangka menggantikan pecahan yang sama emisi tahun 1992. Mulai 1 Juni 1999 Bank Indonesia mengedarkan uang kertas baru pecahan Rp50.000,- yang dipersiapkan untuk menggantikan pecahan Rp50.000,- emisi 1993 yang memuat gambar Presiden Soeharto. Gejolak politik saat itu menimbulkan tuntutan masyarakat untuk agar uang dengan disain utama gambar Presiden Soeharto ditarik dari peredaran.

Bank Indonesia juga menerbitkan uang dalam pecahan Rp100.000,- yang diedarkan mulai 1 November 1999, mengingat nilai transaksi menjadi semakin besar akibat perkembangan ekonomi. Pecahan tersebut menggunakan bahan polymer substrate (plastik) dengan unsur-unsur pengamanan yang lebih tinggi guna mencegah upaya pemalsuan.

Sementara itu, sejalan dengan program logamisasi uang rupiah pecahan kecil, dalam periode ini Bank Indonesia menerbitkan uang logam pecahan Rp500,- (emisi tahun 1997 dari bahan aluminium bronze), Rp100,- dan Rp50,- (keduanya emisi tahun 1999 dari bahan aluminium).

Berikut ini adalah bentuk dan deskripsi dari uang-uang yang dikeluarkan pada periode ini:

1. Uang Kertas Bank Indonesia Emisi Tahun 1997-1999



- | | | | |
|-----|------------------------|---|---|
| 1. | Nama Uang Kertas | : | Uang Kertas Bank Indonesia |
| 2. | Seri / Tahun Emisi | : | 1998 |
| 3. | Pecahan | : | Rp 10.000 |
| 4. | Masa / Jaman | : | Jaman RI Kesatuan |
| 5. | Tgl. Penerbitan | : | 18 Februari 1998 |
| 6. | Tgl. Penarikan Kembali | : | -(Masih Berlaku) |
| 7. | Bahan | : | Kertas |
| 8. | Warna Dominan | : | |
| | a. Depan | : | Coklat/Violet |
| | b. Belakang | : | Coklat/Violet |
| 9. | Tanda air | : | W.R. Soepratman |
| 10. | Penanda tangan | : | - J. Soedrajad Djiwandono
- Mukhlis Rasyid |
| 11. | Ukuran | : | 148 x 72 mm |
| 12. | Disain Utama | : | |
| | a. Depan | : | Gambar Pahlawan Nasional Tjut Njak Dhien |
| | b. Belakang | : | Gambar Segara Anak |
| 13. | Lain-Lain | : | - |



- | | | | |
|-----|------------------------|---|---|
| 1. | Nama Uang Kertas | : | Uang Kertas Bank Indonesia |
| 2. | Seri / Tahun Emisi | : | 1998 |
| 3. | Pecahan | : | Rp 20.000 |
| 4. | Masa / Jaman | : | Jaman RI Kesatuan |
| 5. | Tgl. Penerbitan | : | 23 Januari 1998 |
| 6. | Tgl. Penarikan Kembali | : | -(Masih Berlaku) |
| 7. | Bahan | : | Kertas |
| 8. | Warna Dominan | : | |
| | a. Depan | : | Hijau Muda/Hijau Tua |
| | b. Belakang | : | Hijau Muda/Hijau Tua |
| 9. | Tanda air | : | Ki Hajar Dewantara |
| 10. | Penanda tangan | : | - J. Soedrajad Djiwandono
- Haryono |
| 11. | Ukuran | : | 152 x 72 mm |
| 12. | Disain Utama | : | |
| | a. Depan | : | Gambar Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara |
| | b. Belakang | : | Gambar Kegiatan Belajar |
| 13. | Lain-Lain | : | - |



1. Nama Uang Kertas : Uang Kertas Bank Indonesia
2. Seri / Tahun Emisi : 1999
3. Pecahan : Rp 50.000
4. Masa / Jaman : Jaman RI Kesatuan
5. Tgl. Penerbitan : 1 Juni 1999
6. Tgl. Penarikan Kembali : - (Masih Berlaku)
7. Bahan : Kertas
8. Warna Dominan
 - a. Depan : Ungu/Kuning/Hijau
 - b. Belakang : Ungu/Kuning/Hijau
9. Tanda air : HOS Cokroaminoto
10. Penanda tangan : - Syahril Sabirin
- Dono Iskandar Djojosoebroto
11. Ukuran : 152 x 72 mm
12. Disain Utama
 - a. Depan : - Gambar Pencipta Lagu Indonesia Raya W.R. Soepratman
 - b. Belakang : - Gambar Pengibaran Bendera oleh Pasukan Pengibar Bendera
13. Lain-Lain : -



1. Nama Uang Kertas : Uang Kertas Bank Indonesia
2. Seri / Tahun Emisi : 1999
3. Pecahan : Rp 100.000
4. Masa / Jaman : Jaman RI Kesatuan
5. Tgl. Penerbitan : 1 November 1999
6. Tgl. Penarikan Kembali : - (Masih Berlaku)
7. Bahan : Polymer substrate (Plastik)
8. Warna Dominan
 - a. Depan : Kuning/Jingga/Coklat/Merah/Hijau
 - b. Belakang : Kuning/Jingga/Coklat/Merah/Hijau
9. Tanda air : Shadow image Garuda Pancasila Color Windows bentuk bunga memuat logo Bank Indonesia
10. Penanda tangan : - Syahril Sabirin
- Iwan R. Prawiranata
11. Ukuran : 151 x 65 mm
12. Disain Utama
 - a. Depan : Gambar Dua Pahlawan Proklamator "Dr. Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta"
 - b. Belakang : Gambar Gedung MPR dan DPR
13. Lain-Lain : -

2. Uang Logam Bank Indonesia Emisi Tahun 1997-1999



- | | | | |
|-----|------------------------|---|---|
| 1. | Nama Uang | : | Uang Logam Bank Indonesia |
| 2. | Seri / Tahun Emisi | : | Tahun 1997 |
| 3. | Pecahan | : | Rp 500 |
| 4. | Masa / Jaman | : | RI Kesatuan |
| 5. | Tgl. Penerbitan | : | 28 Agustus 1997 |
| 6. | Tgl. Penarikan Kembali | : | -(Masih Berlaku) |
| 7. | Bahan | : | Aluminium Bronze |
| 8. | Ukuran | | |
| | a. Diameter | : | 24,00 mm |
| | b. Tebal | : | 1,83 mm |
| | c. Berat | : | 5,34 gram |
| 9. | Disain Utama | | |
| | a. Depan | : | Gambar Lambang Negara, Garuda Pancasila |
| | b. Belakang | : | Gambar bunga melati dan teks "500 RUPIAH" |
| | c. Samping | : | Rata |
| 10. | Lain-Lain | : | - |



- | | | | |
|-----|------------------------|---|---|
| 1. | Nama Uang | : | Uang Logam Bank Indonesia |
| 2. | Seri / Tahun Emisi | : | Tahun 1999 |
| 3. | Pecahan | : | Rp 100 |
| 4. | Masa / Jaman | : | RI Kesatuan |
| 5. | Tgl. Penerbitan | : | 30 Maret 1999 |
| 6. | Tgl. Penarikan Kembali | : | -(Masih Berlaku) |
| 7. | Bahan | : | Aluminium |
| 8. | Ukuran | | |
| | a. Diameter | : | 23,00 mm |
| | b. Tebal | : | 2,00 mm |
| | c. Berat | : | 1,79 gram |
| 9. | Disain Utama | | |
| | a. Depan | : | Gambar Lambang Negara, Garuda Pancasila |
| | b. Belakang | : | Gambar burung kakaktua raja dan teks "100 RUPIAH" |
| | c. Samping | : | Rata |
| 10. | Lain-Lain | : | - |



1. Nama Uang : Uang Logam Bank Indonesia
2. Seri / Tahun Emisi : Tahun 1999
3. Pecahan : Rp 50
4. Masa / Jaman : RI Kesatuan
5. Tgl. Penerbitan : 30 Maret 1999
6. Tgl. Penarikan Kembali : - (Masih Berlaku)
7. Bahan : Aluminium
8. Ukuran
 - a. Diameter : 20,00 mm
 - b. Tebal : 2,00 mm
 - c. Berat : 1,36 gram
9. Disain Utama
 - a. Depan : Gambar Lambang Negara, Garuda Pancasila
 - b. Belakang : Gambar burung kepodang dan teks "50 RUPIAH"
 - c. Samping : Rata
10. Lain-Lain : -

CATATAN

1. Pemilihan bahan aluminium berkaitan erat dengan peningkatan harga logam di pasaran dunia. Dengan prinsip mempertahankan keseimbangan antara nilai instrinsik dan nilai nominal uang logam, Bank Indonesia menetapkan penggunaan bahan yang lebih murah, yaitu aluminium untuk menggantikan aluminium bronze yang digunakan untuk emisi tahun 1991.

7. Sistem Pembayaran Non Tunai :
a. Manajemen Alat Pembayaran Non Tunai 1997 - 1999

Sebagaimana disebutkan di atas, kebijakan Bank Indonesia di bidang lalu lintas pembayaran selama periode V ditujukan untuk mengatasi dua permasalahan besar dan dalam rangka pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Sebagaimana disebutkan di atas, kebijakan Bank Indonesia di bidang lalu lintas pembayaran selama periode V ditujukan untuk mengatasi dua permasalahan besar dan dalam rangka pelaksanaan program yang telah direncanakan. Khusus di bidang alat pembayaran non tunai, manajemen yang dijalankan oleh Bank Indonesia adalah:

- 1) Bank Indonesia telah melakukan pembatasan penggunaan Nota Debet Dalam Kliring. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penggunaan Nota Debet yang tidak sesuai dengan praktik perbankan yang sehat sekaligus menjaga prinsip kehati-hatian dalam operasionalisasi perbankan. Dalam ketentuan ini, jumlah maksimum Nota Debet yang digunakan untuk menagih dana pada bank lain untuk bank pengirim atau untuk untung nasabah bank pengirim hanya dibatasi pada Nota Debet yang berisi tagihan yang menyangkut penggantian biaya jasa perbankan atau tagihan pembayaran cek perjalanan dengan nilai maksimum Rp10 juta. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar sebesar persentase tertentu dari nilai nominal.
- 2) Sebagaimana telah disebutkan di atas, Bank Indonesia melakukan uji coba sistem BI-LINE (Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi secara Elektronik). Sistem ini merupakan suatu sistem transfer dana elektronik antarbank dan antarkantor melalui rekening bank-bank yang ada di Bank Indonesia. BI-LINE pada dasarnya akan menggantikan Bilyet Giro Bank Indonesia (BGBI) yang selama ini merupakan media bagi bank dalam melakukan transaksi antarbank atau antarkantor melalui Bank Indonesia. BI-LINE memberikan dua manfaat utama, yaitu (i) menghilangkan masalah pengiriman warkat sehingga masalah money in transit dapat teratasi dan (ii) memungkinkan bank untuk meminimalkan mismatch karena setiap saat dapat mengetahui saldo rekening gironya di setiap Kantor Bank Indonesia (KBI).
- 3) Sebagai langkah antisipasi terhadap masalah millenium bug yang mungkin timbul dalam tahun 2000, Bank Indonesia telah melakukan penyempurnaan sistem pembayaran dan sistem penunjangnya. Penyempurnaan tersebut dilakukan dengan menerapkan Year 2000 (Y2K) Compliance pada program semi otomasi kliring lokal (SOKL) dan mesin reader sorter serta sistem akunting Bank Indonesia. Sampai dengan akhir tahun laporan, 18 KBI telah merampungkan persiapan Y2K compliance tersebut dan sebelum akhir tahun 2000 seluruh KBI diharapkan telah menyelesaikan persiapan tersebut. Di samping itu, Bank Indonesia juga meminta perbankan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Y2K compliance.
- 4) Sementara itu untuk mencegah risiko kegagalan penyelesaian pembayaran dan float, terutama terhadap transaksi pembayaran yang bernilai besar, diperlukan penyelesaian transaksi pembayaran yang bersifat on-line real time tanpa melalui

proses kliring. Sehubungan dengan hal tersebut, pada periode ini Bank Indonesia melanjutkan pengembangan sistem real time gross settlement (RTGS) yang telah dimulai pada tahun sebelumnya.

- 5) Upaya pengembangan lain yang dilakukan pada periode ini adalah mendorong terbentuknya Sistem Transfer Dana Dolar secara Elektronik Jakarta (STDDJ), yang merupakan sistem transfer dana dolar lokal secara elektronik dan real time. Dengan sistem ini transfer dana dolar lokal dapat dilakukan dengan cepat dan relatif murah. Pengembangan sistem ini diperlukan karena kegiatan transfer dana dalam bentuk valuta asing, khususnya dolar, cenderung meningkat, seiring dengan makin terbukanya perekonomian Indonesia dan cepatnya globalisasi ekonomi.

b. Alat Pembayaran Non Tunai 1987-1999

1. Alat pembayaran non tunai yang digunakan dalam periode ini relatif masih sama dengan alat pembayaran non tunai yang digunakan pada periode sebelumnya.
2. Pada periode ini alat pembayaran non tunai dengan media elektronik berkembang pesat di Indonesia.
3. Penggunaan kartu debit dan smart card pada tahun 1997 lebih kurang 1 (satu) juta lembar dengan nilai nominal transaksi sebesar Rp300 milyar dan jumlah transaksi sebesar 934 ribu.
4. Transaksi pembayaran non tunai yang juga diminati masyarakat adalah penarikan tunai melalui automated teller machine (ATM).

1. Alat pembayaran non tunai yang digunakan dalam periode ini relatif masih sama dengan alat pembayaran non tunai yang digunakan pada periode sebelumnya. Namun dalam periode ini diperkenalkan warkat "Nota Debet Dalam Kliring" sehubungan dengan terjadinya krisis perbankan. Waktu itu, untuk mencegah kegagalan sistemik termasuk terganggunya sistem pembayaran akibat krisis perbankan, Bank Indonesia memberikan bantuan likuiditas kepada bank-bank yang mengalami saldo negatif pada rekening gironya di Bank Indonesia dalam bentuk pemberian izin bersaldo debit. Bank Indonesia menetapkan penggunaan Nota Debet Dalam Kliring untuk mengurangi risiko kegagalan sistem pembayaran yang ditanggung Bank Indonesia.
2. Pada periode ini alat pembayaran non tunai dengan media elektronik berkembang pesat di Indonesia, dan terdiri dari Kartu Kredit, Kartu Debet, Automated Teller Machine (ATM). Disamping itu banyak produk perbankan lainnya yang telah dan akan diperkenalkan kepada masyarakat seperti Electronic Fund Transfer/Point of Sales (SFT/POS), phone/direct banking, dan Smart Card. Sebagai indikasi meningkatnya penggunaan Kartu Kredit adalah bahwa sampai dengan akhir tahun 1997, nilai transaksi kartu kredit di Indonesia mencapai

Rp8,4 triliun atau meningkat pesat sebesar 78,7% dibandingkan pada tahun sebelumnya, dan jumlah transaksi mencapai sebesar Rp25 Juta. Namun pada tahun 1998 penggunaan kartu kredit mengalami penurunan akibat adanya kecenderungan penurunan penyaluran kredit konsumsi perbankan kepada masyarakat untuk menghindari risiko pembayaran dan kemungkinan adanya keengganan masyarakat untuk menggunakan kartu kredit sebagai akibat tingginya suku bunga yang dikenakan serta adanya pengenaan biaya transaksi kepada nasabah atas penggunaan kartu kredit. Pada tahun 1999 terjadi kenaikan pada penggunaan kredit, baik dari segi frekuensi maupun nilai transaksi.

3. Penggunaan kartu debit dan smart card pada tahun 1997 lebih kurang 1 (satu) juta lembar dengan nilai nominal transaksi sebesar Rp300 milyar dan jumlah transaksi sebesar 934 ribu. Selanjutnya pada tahun 1998 jumlah kartu debit dan smart card naik 4,45 juta transaksi atau 445% dari 1 juta lembar menjadi 5,45 juta lembar, dengan transaksi yang meningkat Rp4,9 triliun atau 1633% dari Rp300 milyar tahun 1997 menjadi Rp5,2 triliun dan dalam transaksi meningkat sebesar 15,2 juta atau atau 1689% dari 934 ribu transaksi tahun 1997 menjadi 16,1 juta transaksi. Peningkatan tersebut terjadi karena sudah mulai terjadi perlombaan antarbank dalam menerbitkan kartu debit. Disamping itu, pemegang kartu kredit sudah banyak yang beralih menjadi pemegang kartu debit.

Pada tahun 1999 jumlah kartu debit dan smart card naik 6,65 juta atau 122% dari 5,45 juta lembar tahun 1998 menjadi 12,1 juta lembar, tetapi transaksi menurun Rp1,8 triliun atau 33% dari Rp5,2 triliun tahun 1998 menjadi Rp3,4 triliun, dan dalam transaksi turun sedikit 0,1 juta atau 0,6% dari 16,1 juta transaksi tahun 1998 menjadi 16,0 juta. Pada tahun 1999 jumlah pemegang kartu debit meningkat tajam menjadi 12,1 juta pemegang, tetapi nominal transaksi menurun. Diperkirakan penurunan tersebut akibat berkembang pesatnya kartu ATM yang multiguna.

4. Transaksi pembayaran non tunai yang juga diminati masyarakat adalah penarikan tunai melalui automated teller machine (ATM). Hingga tahun 1997 data yang ada menunjukkan jumlah mesin ATM mencapai 4000 unit. Jumlah kartu ATM tahun 1997 mencapai 4 juta kartu, lebih banyak dibandingkan dengan 2,9 juta kartu pada tahun 1996. Volume transaksi selama tahun 1997 mencapai Rp13,5 triliun, meningkat Rp3,1 triliun atau 30,0% dibanding volume transaksi tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp10,4 triliun. Pada tahun 1998 jumlah pemegang kartu ATM meningkat 7,1 juta atau 177,5% dari 4 juta menjadi 13,1 juta pemegang. Jumlah transaksi ATM selama tahun 1998 dalam nominal meningkat 108,9% dari tahun 1997 mencapai Rp28,2 triliun. Transaksi ATM meningkat sebesar 22,2 juta transaksi atau 96% dari 11,7 juta transaksi tahun 1997 menjadi 22,9 juta transaksi. Pada tahun 1999 pemegang kartu ATM meningkat 23% dari 13,1 juta menjadi 16,1 juta pemegang. Jumlah transaksi meningkat sebesar 202,8%, yaitu dari Rp28,2 triliun pada tahun 1998 menjadi Rp85,4 triliun.